

KINERJA PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN SAMARINDA ILIR KOTA SAMARINDA

Andi Muhammad Ardan¹

Abstrak

Andi Muhammad Ardan. Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, di bawah bimbingan Dr. Heryono Susilo Utomo M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Santi Rande, M.Si selaku pembimbing II.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda serta faktor kendala atau penghambat. Fokus penelitian ini yaitu Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sumber data primer dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Temuan dari penelitian ini diketahui bahwa Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda baik dalam kualitas kerja dan kemampuan berjalan dengan cukup baik, hanya dalam hal inisiatif dan komunikasi belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari masih adanya perselisihan antara Satpol PP dengan pedagang dan adanya oknum dari anggota Satpol PP yang justru bekerjasama dengan pihak Pedagang Kaki Lima, selain itu kendala yang dihadapi adalah oknum masyarakat yang dalam hal ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melindungi pedagang dari penertiban dan pedagang di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda masih banyak yang tidak mendengarkan teguran ataupun penertiban yang dilakukan Satpol PP hingga terkendala pada saat melakukan penertiban pedagang kaki lima.

Kata Kunci : *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima*

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Email: andi_muh_ardan@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masalah Pedagang Kaki Lima menjadi sesuatu yang mengganggu ketertiban umum di Kota Samarinda. Pedagang Kaki Lima tidak akan sulit untuk dijumpai karena sering terlihat melakukan aktivitasnya di tempat-tempat yang sering kita kunjungi seperti di daerah tepian kota dan biasa mengambil bahu jalan yang mengakibatkan kenyamanan pejalan kaki. Hal ini tentunya akan mengakibatkan ketidaknyamanan masyarakat, dan hal ini juga yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum, sehingga pembentukan tatanan kota yang tertib menjadi terkendala.

Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum sangat diharapkan terutama dalam bentuk penertiban Pedagang Kaki Lima, karna hal ini adalah merupakan salah satu tugas dan fungsi Satpol PP sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 06 Tahun 2010.

Berdasarkan latar belakang diatas dan pengamatan sementara di lapangan menimbulkan keinginan untuk menulis dan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan Pedagang Kaki Lima yang masih beroperasi di daerah yang tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan berdagang. Khususnya mengenai “Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah maka tentunya ada tujuan yang penulis harapkan dalam penulisan skripsi ini. “tiap penelitian harus mempunyai tujuan atau tujuan-tujuan yang harus dicapai” (S. Nasution, 2003:17). Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda?
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kinerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda?

Manfaat Penelitian

Adapun dalam sebuah penelitian pasti akan adanya sebuah manfaat dari hasil penelitian tersebut. Begitu juga dengan penelitian yang penulis lakukan mengenai Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, dan berikut adalah manfaat penelitian tersebut, yaitu :

Dari Segi Teoritis:

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang Administrasi Negara secara khusus.
- b. Menambah wawasan serta pengetahuan dan kemampuan untuk membuat karya ilmiah bagi penulis.

Dari Segi Praktis:

- a. Sebagai tolak ukur bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima.
- c. Sebagai tambahan informasi bagi semua pihak baik pemerintah, kalangan akademik atau mahasiswa yang tertarik pada masalah yang diteliti.

KERANGKADASAR TEORI

Teori dan Konsep

Manajemen Sumber Daya Manusia

Mangkunegara (2007:2) Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu perencanaan pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Kinerja

Kinerja menurut Widodo (2006:78) mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Tolak Ukur Kinerja

Kemudian menurut Sedarmayanti, (2001:51) yang menyatakan bahwa tolak ukur dalam kinerja adalah :

1. Kualitas kerja
2. Inisiatif
3. Kemampuan
4. Komunikasi

Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Surianingrat (1980:26) Satpol PP adalah suatu perangkat atau pejabat Pemerintah yang ada di daerah yang tugasnya adalah melaksanakan urusan pemerintahan umum/Pemerintah Pusat.

Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima menurut Perda Kotamadya tingkat II Samarinda Nomor. 1 Tahun 1990 disebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah pedagang

yang tergolong sebagai pedagang ekonomi lemah yang belum pernah memiliki izin usaha, dimana didalam menjalankan usahanya menggunakan bagian jalan atau trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan sebagai tempat usaha.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu abstraksi dari kejadian yang menjadi sasaran penelitian dan juga memberi batasan tentang luasnya ruang lingkup penelitian. Di dalam penelitian ini definisi konsepsional dari Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah suatu hasil yang dicapai oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan pelaksanaan tugas dengan memperhatikan indikator-indikator yang meliputi kualitas kerja, inisiatif, kemampuan dan komunikasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dan dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2013:1).

Fokus Penelitian

Sesuai dengan tujuan pengujian hipotesis mengenai deskriptif atau penggambaran ataupun menuliskan tentang Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda.

1. Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja :
 - a. Kualitas kerja
 - b. Inisiatif
 - c. Komunikasi
 - d. Kemampuan
2. Faktor-faktor penghambat Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan pedagang kaki lima di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda. Karena Kota Samarinda masih sering terlihat aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda yang dimana menjadi sebuah dipertanyakan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat berupa benda, hal atau orang yang dapat diamati dan memberikan data maupun informasi yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, pemilihan narasumber dilakukan melalui teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013:53-54) teknik *Purposive Sampling* adalah menentukan subjek/objek sesuai tujuan, teknik sampling ini digunakan dengan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian, peneliti

memilih subjek/objek sebagai unit analisis yang berdasarkan kebutuhannya dan menganggap bahwa unit analisis tersebut representatif. Dan *Snowball Sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlah kecil, kemudian membesar. Teknik sampling ini juga digunakan karena dengan adanya beberapa pertimbangan terhadap topik penelitian yang menjadi objek penelitian.

Menurut Sugiyono (2013 : 62) sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau ada hubungannya dengan objek melalui tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan fokus penelitian yang penulis teliti. Adapun sumber data yakni:
 - a. *Key informan* adalah Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
 - b. *Informan* adalah Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, masyarakat yang dalam hal ini adalah Pedagang Kaki Lima.
2. Data Sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Penulis peroleh melalui sumber informan, yakni :
 - a. Dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan laporan-laporan.
 - b. Buku-buku referensi yang terdapat di perpustakaan sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Pasolong (2012:130) Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer, untuk kebutuhan suatu penelitian. Pengumpulan data yaitu merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka analisis penelitian. Untuk penulisan skripsi ini, penulis dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa cara atau teknik sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan *Library Research* yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku – buku sebagai bahan referensi.
2. Penelitian Lapangan *Field Work Research* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:
 - a. Observasi yaitu pengamatan langsung dilapangan.
 - b. Wawancara sebagai pelengkap dan pendukung serta pembanding dengan data dan informasi yang diperoleh.
 - c. Dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan tentang data dan fakta mengenai objek penelitian maka analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman dan Saldana (2014:31-33) mengatakan bahwa di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifications*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Samarinda dibentuk dan didirikan pada tanggal 21 Januari 1960 berdasarkan UU darurat No. 3 tahun 1953. Lembaran Negara No. 97 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya di Kalimantan Timur. Semula Kodya Dati II Samarinda terbagi dalam 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Seberang. Kemudian dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur No. 18/Sk/TH-Pem/1969 dan Sk No, 55/TH-Pem/SK/1969, terhitung sejak tanggal 1 Maret 1969 wilayah administratif Kota Madya Daerah Tingkat II Samarinda ditambah dengan 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Palaran, Sangasanga, Muara Jawa dan Samboja (Luas Sekitar 2.727 km²). Saat ini pembagian kecamatan di Samarinda tidak termasuk Sanga-sanga, Muara Jawa dan Samboja. Ketiganya masuk dalam Kabupaten Kutai Kartanegara.

Analisis Data

Kualitas Kerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi salah satu tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan penegakan Perda. Dalam rangka penegakan Perda, salah satu Perda yang harus ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perda Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda.

Dalam pelaksanaan Perda tersebut tentunya Satuan Polisi Pamong Praja berharap hasil dari penertiban pedagang kaki lima sesuai dengan apa yang diharapkan, hal tersebut dikatakan telah sesuai jika hasilnya sesuai dengan yang ada didalam Perda dimana pedagang kaki lima tidak boleh berjualan di badan jalan.

Inisiatif Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima

Dalam melakukan suatu pekerjaan tentunya dibutuhkan sebuah inisiatif yang baik, apabila inisiatif anggota berjalan maka membuat hasil pekerjaan menjadi lebih maksimal. Penertiban yang dilakukan oleh anggota Satpol PP secara rutin dilakukan 3 kali dalam seminggu, tetapi terkadang anggota Satpol PP

juga menerima surat perintah untuk melakukan penertiban di daerah-daerah tertentu.

Komunikasi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima

Komunikasi merupakan salah satu unsur penting didalam suatu kegiatan, apalagi penertiban ini bersangkutan dengan masyarakat yang mencari nafkah. Dengan adanya komunikasi akan membuat pekerjaan tersebut berjalan dengan baik, begitu juga dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima, komunikasi yang baik antara anggota Satpol PP dengan pedagang sangat diperlukan sehingga tidak ada kesalahan dalam melaksanakan tugas karena saling mendukung, hal ini bertujuan agar hasil dari penertiban pedagang kaki lima menjadi lebih baik.

Kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima

Kemampuan atau keahlian merupakan salah satu hal yang harus ada pada setiap anggota Satpol PP, ketika anggota Satpol PP Mempunyai keahlian yang mampu permasalahan didalam penertibana maka kinerja dari Satpol PP dapat menjadi lebih baik. Kemampuan anggota Satpol PP dalam penertiban dapat dilihat pelatihan yang telah diberikan sebelum anggota diterima menjadi pegawai Satpol PP.

Faktor Kendala atau Penghambat

Dalam melaksanakan tugasnya dalam menertibkan pedagangn kaki lima, Satuan Polisi Pamong Praja tidak lepas dari kendala atau hambatan. Kendala atau hambatan merupakan sesuatu yang harus dihadapi tentunya dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Pembahasan

Tentunya dalam penertiban pedagang kaki lima Satpol PP bekerja berdasarkan Perda yang ada, dimana dalam Perda ini dikatakan bahwa pedagang kaki lima dilarang berjualan di bahu jalan, di atas parit bahkan menggunakan kendaraan sekalipun. Hal inilah yang menjadi patokan bagi Satpol PP untuk melihat sejauh mana kualitas kerja mereka apakah sesuai atau tidak. Hal ini sesuai dengan pendapat Sedarmayanti (2011:51) Yaitu hasil kerja dari tiap-tiap individu atau pegawai yang diukur lewat kecermatan, ketelitian, dan ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan kualitas kerja ini akan berindikasi pada tingkat kepuasan dari tiap-tiap bagian terkait dengan hasil kerja yang dihasilkan. Sejauh ini Satpol PP telah melakukan berdasarkan Perda tersebut dimana penertiban dilakukan 3 kali dalam 1 bulan, ini adalah tindakan yang diambil untuk tetap mengawasi daerah-daerah yang memang dilarang untuk pedagang kaki lima untuk melakukan kegiatannya.

Selain berdasarkan tugas yang ada anggota Satpol PP juga bekerja berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya, dimana instruksi ini dijadikan dasar dalam melaksanakan tugas. Seperti yang dikatakan Sedarmayanti (2001:51) Yaitu merupakan sesuatu hal yang timbul dari dalam diri individu atau pegawai lewat setiap apa yang dikerjakan. Inisiatif merupakan upaya kreativitas dengan

batas-batas tertentu yang dilakukan oleh individu atau pegawai dalam melaksanakan tugasnya tanpa harus menunggu perintah atau instruksi dari atasan. Salah satu instruksi yang diterima berupa perintah untuk melakukan tugas di daerah atau tempat tertentu di Kota Samarinda. Dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima ada hal-hal yang harus dipatuhi oleh anggota Satpol PP yaitu untuk tidak bekerjasama dengan pedagang, melakukan tindakan kekerasan seperti membentak apalagi sampai memukul, hal ini bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran HAM dan seperti instruksi yang berikan kepada mereka untuk lebih melakukan pendekatan secara persuasif dimana sebelum menangkap atau menertibkan anggota Satpol PP harus terlebih dahulu menayakan identitas diri.

Komunikasi anggota Satpol PP dengan pedagang kaki lima sebelum melakukan penertiban pedagang kaki lima dapat dilihat dari setiap anggota saling respon yang ditunjukkan pedagang saat dijalankannya penertiban dilapangan. Komunikasi antara anggota dan pedagang ini menjadi faktor penting agar Satpol PP dapat mencapai hasil kerja yang lebih baik. Akan tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Satpol PP untuk mewujudkan komunikasi yang baik dengan pedagang kaki lima, hal ini seperti ketidakpahaman pedagang tentang Perda yang melarang aktifitas pedagang kaki lima. Dan juga saat melakukan komunikasi dengan pedagang tidak jarang yang ditemui adalah LSM yang melindungi pedagang agar tidak terjadi penertiban. Jika dilihat komunikasi antara anggota Satpol PP dengan pedagang kaki lima tidak berjalan begitu baik, tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi yang tidak baik antara anggota dan pedagang dapat mempengaruhi kinerja dari Satpol PP dan hasil kerja mereka, karena untuk mendapatkan hasil kerja yang lebih baik diperlukan komunikasi yang baik antara anggota Satpol PP dengan pedagang. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Sedarmayanti (2015-51) Yaitu komunikasi yang terjalin dengan baik antar *personal* atau individu pegawai dalam sebuah organisasi baik secara horizontal (antar sesama pegawai) maupun secara vertikal (antar pimpinan dan bawahan), guna memaksimal setiap penyelesaian tugas dan pekerjaan.

Kemampuan atau keahlian adalah hal yang harus dimiliki dari anggota Satpol PP karena dalam melakukan penertiban tentu akan ada insiden yang terkadang tidak diharapkan ataupun yang sesuai harapan. Karena saat ada insiden yang tidak diinginkan maka fungsi kemampuan ini adalah sebagai penengah agar tidak terjadi kesalahpahaman antara anggota dan pedagang. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Sedarmayanti (2015-51) Yaitu dimana setiap individu atau pegawai dituntut untuk memiliki kemampuan dalam setiap hal pekerjaan yang diperhadapkan kepadanya. Yang mana kemampuan individu ini dapat diperoleh berdasarkan latarbelakang tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh individu atau pegawai tersebut, dan juga dapat dibangun berdasarkan pengalaman dari tiap-tiap individu.

Faktor kendala atau penghambat yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima adalah oknum Satpol PP maupun oknum

masyarakat yang dalam hal ini adalah LSM. Hal ini tentunya menghambat rencana kegiatan yang telah dibuat. Tentunya hal ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Satpol PP untuk bekerja secara optimal dan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka,

1. Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Yaiut
 - a. Kualitas kerja dari penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh anggota Satpol PP cukup baik. Akan tetapi belum terlalu optimal karena masih banyak terdapat pedagang kaki lima yang beraktifitas di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda
 - b. Inisiatif anggota Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima sudah baik karena anggota Satpol PP bekerja berdasarkan tugas dan instruksi yang diberikan, hampir seluruh anggota juga menaati peraturan yang ada seperti tidak bertindak kasar dan bekerjasama dengan pedagang kaki lima. Walaupun ada beberapa oknum yang bekerjasama dengan pedagang kaki. Satpol PP telah menetapkan sanksi bagi para anggotanya yang tidak menaati peraturan.
 - c. Komunikasi antara anggota Satpol PP dan pedagang kaki lima belum bisa dikatakan baik, karena masih sering terjadi insiden-insiden yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dalam pelaksanaan penertiban. Sementara komunikasi dilakukan oleh Satpol PP dengan Polisi, Dinas Pasar dan Kecamatan untuk menertibkan pedagang kaki lima belum bisa dikatakan baik, karena setelah penertiban dilakukan, tindak lanjut dari dinas pasar kepada pedagang yang telah ditertibkan tidak berjalan.
 - d. Kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh anggota Satpol PP sudah terbilang baik, karena saat penertiban anggota Satpol PP mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan apabila ada insiden yang terjadi dilapangan, anggota Satpol PP mampu untuk menghadapi para pedagang agar mengerti mengenai pelanggaran yang telah dilanggar oleh para pedagang.
2. Adapun kendala yang dihadapi oleh Satpol PP adalah oknum dari internal Satpol PP dan juga oknum dari LSM yang melindungi para pedagang saat melakukan penertiban. Karena saat akan melakukan penertiban terkadang pedagang yang akan ditertibkan tidak beraktifitas karena adanya bocoran dari oknum Satpol PP dan LSM.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian serta bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya sanksi tegas dari Satpol PP apabila terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Menjalankan komunikasi dengan baik bersama pedagang kaki lima, seperti breafing mengenai peraturan tentang larang pedagang kaki lima, agar pedagang lebih mengetahui kesalahan yang pedagang lakukan. Dan agar tidak ada selisih paham antara Satpol PP dengan Pedagang Kaki Lima.
3. Penambahan jumlah anggota Satpol PP wanita yang siap untuk ditugaskan di lapangan, hal ini bertujuan agar pendekatan terhadap pedagang kaki lima. Karena mayoritas dari pedagang adalah wanita/ibu-ibu.
4. Melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan daerah tentang larangan pedagang kaki lima dengan cara mendatangi para PKL, agar PKL lebih mengetahui tentang peraturan daerah kota Samrinda tentang larangan berdagang ditempat yang tidak diizinkan.

Daftar Pustaka

- Bangun, Wilson. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Budiyanto, Eko. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Darmawan, Didit. 2013. *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. Surabaya: Press Media.
- Dwiyanto, Agus dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Keban, Yaremis T. 1995. *Indikator Kinerja Pemda: Pendekatan Manajemen Dan Kebijakan*. Yogyakarta: (makalah)
- Lamatenggo, Nina. 2012. *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1999. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 589/IX/6Y/99. *Tentang Pedoman Penyesuaian Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2003. *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Prawirosentono, Suryadi. 1990. *Mamajemrn Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat Menuju Organisasi Kompetitif Dalam Perdagangan Bebas Dunia*. Yogyakarta: BPFE.

- Poerwadarminta. W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Riani, Asri Laksmi. 2010. *Budaya Organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Robbins, P. Stephen, 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Disain & Aplikasi*. Jakarta: Arcan.
- Samsudin, Sadili. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sedarmayanti, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung Alfabeta.
- _____. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Widodo, Joko. 2006. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Jakarta: Bayumedai Publishing.
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi*. Bandung: Fokusmedia
- Nasucha, Chaizi 2004. *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktek*. Jakarta: Grasindo.

Dokumen-dokumen

- Undang-Undang Dasar 1945.
- UU Aparatur Sipil Negara No 05 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 05 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 19 Tahun 2001 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2014.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Negara (Kepmenpan) Nomor. 81 Tahun 1995.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia

Sumber Internat:

- Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. 2015. *Statistik Daerah Kota Samarinda 2015*, (Online), (<http://samarindakota.bps.go.id>, di akses 4 November 2015).